

---

**KONFERENSI NASIONAL  
KEARIFAN LOKAL: NILAI, PRAKTIK  
DAN TANTANGAN PERUBAHAN**



**PROSIDING**

SOLL MARINA HOTEL PANGKALAN BARU  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
20-21 SEPTEMBER 2017

---

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

*ISBN 978-602-50027-0-0*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

*Alhamdulillah rabbil'alamin.* Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga prosiding ini dapat terselesaikan dengan baik. Prosiding ini berisi kumpulan makalah dari berbagai daerah di Indonesia yang telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam Konferensi Nasional Kearifan Lokal: Nilai, Praktik dan Tantangan Perubahan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung pada Hari Rabu, 20-21 September 2017. Prosiding ini disusun untuk mendokumentasikan gagasan dan hasil penelitian terkait inovasi dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang berbasis kearifan lokal. Prosiding ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan gambaran tentang perkembangan kearifan lokal dan permasalahannya yang justru saat ini mulai mengalami degradasi baik dari segi historisnya maupun nilainya. Fenomena tersebut diteliti sehingga memunculkan solusi-solusi strategis yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan atau *stakeholder* dalam upaya peningkatan pembangunan nasional.

Dalam penyelesaian prosiding ini, kami menyadari bahwa tiada gading yang tak retak. Banyak kekurangan dan kesalahan yang dilakukan sehingga tanpa bantuan oleh semua pihak maka mustahil prosiding ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Rektor Universitas Bangka Belitung, Dr. Muh. Yusuf, M. Si., yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan ini.
  2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Dr. Ibrahim, M. Si., atas segala dukungan, petunjuk dan motivasi dalam kegiatan ini.
  3. Seluruh pembicara tamu, Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A., Prof. Dr. Bustami Rahman, M. Sc., dan Prof. Dr. Zulkifli Harmi, M.A.
  4. Bapak/Ibu seluruh dosen, guru dan pejabat instansi penyumbang artikel hasil penelitian dan pemikiran ilmiah dalam kegiatan konferensi nasional ini. Kami menyadari bahwa prosiding ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan prosiding pada terbitan tahun yang akan datang.
  5. Bapak/Ibu/Mahasiswa seluruh panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran demi kesuksesan acara ini.
- Akhirnya kami berharap prosiding ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

Wassalamualaikum wr. wb.

Pangkalan Baru, 20 September 2017  
Ketua Panitia,

Sandy Pratama, M. Si

<b>JADWAL KONFERENSI NASIONAL KEARIFAN LOKAL FISIP UBB TAHUN 2017</b>		
<b>Hari / Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>
Selasa, 19 September 2017	07.00 – 20.00	Kedatangan dan Registrasi Ulang Peserta Nasional
Rabu, 20 September 2017	07.30 – 08.30	Registrasi Peserta Seminar
	08.30 – 09.30	Pembukaan Seminar Nasional
	09.30 – 09.50	Coffee break
	09.50 – 12.00	<b>Konferensi Nasional “Kearifan Lokal: Nilai, Praktik, dan Tantangan”</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A.</b> (Guru besar Sejarah Universitas Gadjah Mada)</li> <li>2. <b>Prof. Dr. Bustami Rahman, M. Sc.</b> (Guru besar Sosiologi Universitas Bangka Belitung)</li> <li>3. <b>Prof. Dr. Zulkifli Harmi, M.A.</b> (Guru besar Antropologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)</li> </ol>
	12.00 – 13.00	Ishoma
	13.00 – 15.00	<b>Paralel Konferensi Sesi I</b>
	15.00 – 15.30	Coffe break
	15.30 – 17.15	<b>Paralel Konferensi Sesi lanjutan</b>
	19.00 – 21.00	Jamuan Makan Malam dengan Walikota Pangkalpinang
Kamis, 21 September 2017	07.30 – 08.30	<i>City Tour</i> Museum Timah-Kampus Universitas Bangka Belitung
	08.30 – 12.00	<i>City Tour</i> Kearifan Lokal (Nganggung 1 Muharram Desa Kenanga Sungailiat)
	12.00 – 14.00	<i>City Tour</i> Pantai Tongachi dan Puri Tri Agung
	14.00 – 17.00	Kuliner <i>Seafood</i> Pantai Rambak
	19.00 – 21.00	Penutupan dan Jamuan Makan Malam Bupati Bangka
Jumat, 22 September	07.00 - ....	Kepulangan, sayonara.....

2017		

**JADWAL DAN PEMBAGIAN RUANGAN SESI PARAREL KONFERENSI  
RUANG A (BATU BEDAUN II)**

<b>NO</b>	<b>WAKTU</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL</b>
1	13.00 – 13.10	Siti Chodijah	Model Pembinaan Keagamaan Melalui Bimbingan Pribadi Sosial Dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Siswa
2	13.10 – 13.20	Putra Pratama S.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Rumah Panggung Di Desa Air Duren Kabupaten Bangka
3	13.20 – 13.30	Hadriana Marhaeni M.	Fenomena Ketimpangan Gender Pada Masyarakat Pakpak
4	13.30 – 13.40	Ahmad Jailani	Inklusivitas Dan Eksklusivitas Batas Sosial Budaya Etnis Tionghoa (Studi Terhadap Etnis Tionghoa Di Desa Air Menduyung)
5	13.40 – 13.50	Herdianyanti & Jamilah C.	Pergeseran Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Mandi Belimau Di Dusun Limbung Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
6	13.50 – 14.00	Iwan Nurhadi	Ethno-science pemanfaatan nilai-nilai lokal sebagai Strategi mitigasi bencana di dataran tinggi jawa timur
	14.00 – 14.10	<b>JEDA</b>	
7	14.10 -14. 20	Muh. Rafli Abas	Politik Kedaulatan Pangan Berbasis Agropolitan (Strategi Dan Intervensi Kebijakan Pemerintah Propinsi Gorontalo Dalam Sentra Komoditas Jagung)
8	14.20 – 14.30	Rizabuana Ismail & Devi Sihotang	Mereposisi Dan Melestarikan Keberadaan “Namalo” Dalam Melakukan Pengobatan Tradisional Pada Masyarakat Batak Toba Di Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera

9	14.30 – 14.40	Nurvita Wijayanti	Analisis Pendefinisian Diksi Lokal Dalam Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Dalam Novel <i>Rainbow Troop</i> Oleh Andrea Hirata: Studi Terjemahan Berbasis Kultural
9	14.40 – 14.50	Widya Handini	The relationship between coping strategies (food security and households' well-being in lapedrera. Amazonas (colombia)
10	14.50 – 15.00	Aimie Sulaiman	<i>Rationality behind irrationality</i> Menyasar dukun kampong belitung dalam konsep <i>world view</i> weber
	15.00 – 15.30	<b>COFFEE BREAK</b>	
12	15.30 – 15.40	Fitri Ramdhani Harahap	Kosmologi Dan Mitologi Suku Lom
	15.50 – 16.00	Ahmad Yusuf	Komunitas Hijabers Babel Dalam Telaah Posmodernisme Jean Baudrillard
13	16.00 – 16.10	Muliadi	Analisis Relasi Sosial Pada Masyarakat Gated Community Di Kota Pangkalpinang (Studi Di Perumahan Graha Puri Kota Pangkalpinang)
14	16.10 – 16.20	Herza	Fenomena Tengkulak Perempuan Di Kelurahan Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang
15	16.20 – 16.30	Nur Dyah Gianawati & Ardiyanto	Penguatan kredibilitas dan komunikasi politik caleg perempuan (gagasan bagi caleg perempuan menjelang pemilu 2019)
16	16.30 – 16.40	Masni	Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Modal Sosial (Studi Pada Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Terak Kabupaten Bangka Barat)

17	16.40 – 16.50	Beni Ritiauw	Perdamaian Berbasis Adat di Hila salam-Sarane
<p><b>JADWAL DAN PEMBAGIAN RUANGAN SESI PARAREL KONFERENSI RUANG B (BATU BEDAUN III)</b></p>			
1	13.00 – 13.10	Sandy Pratama	Taber laot dan pengembangan wisata pantai gusung; Politik resistensi pertambangan laut Di desa batu beriga, bangka tengah
2	13.10 – 13.20	Irwan	RELASI KUASA DAN MODAL (Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nangka Terhadap Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gemilang Cahaya Mentari)
3	13.20 – 13.30	Darwance	Pelestarian Kearifan Lokal Sebagai Potensi Daya Tarik Wisata Melalui Kebijakan Di Bidang Legislasi
4	13.30 – 13.40	Perawati Sinti	Dekonstruksi Budaya Terhadap Perempuan Dalam Akses Pendidikan
5	13.40 – 13.50	Novendra Hidayat	Minangkabau dan politik elektoral (studi pemanfaatan identitas minangkabau pada pemilu pada bangka belitung 2017)
6	13.50 – 14.00	Rio Yusri Maulana	Pengawasan Politik Dprd Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Di Era Reformasi



	<b>14.00 – 14.10</b>	<b>JEDA</b>	
7	14.10 – 14.20	Ria Manurung & Junjungan SBP. Simanjutak	Posisi Perempuan Batak Toba sebagai Anak Perempuan Raja (boru ni raja) dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga di Medan
7	14.20 – 14.30	Riska Novalia	Kekerasan Simbolik Terhadap Peluang Kerja Tuna Daksa Dalam Instansi Di Sungailiat
8	14.30 – 14.40	Iskandar Zulkarnain	Pesona Komunitas Adat di antara Perjuangan Otonomi dan Kuasa Pasa
9	14.40 – 14.50	Rendy	Dari kepong ke kampung (adat & demografi politik keseharian warga pekebun lada di pengkalan batu- ranggung bangka selatan)
10	14.50 – 15.00	Yusa Djuyandi	Sinergitas Satuan Komando Wilayah Tni Ad Dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Menumbuhkan Semangat Bela Negara
	<b>15.00 – 15.30</b>	<b>COFFEE BREAK</b>	
11	15.30 – 15.40	Henry Sitorus & Marlon Sihombing	Model Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Adat untuk Resolusi Konflik Perusahaan Tambang di Provinsi Sumatera Utara
11	15.40 – 15.50	Dwi Haryadi	Menjaga Lingkungan Bangka Belitung Melalui Penegakan Hukum Dan Kearifan Lokal
12	15.50 – 16.00	Ranto	Petaka Politik Timah Di Babel: Kebijakan Tak Sensitif Nelayan (Pengalaman Nelayan Di Bangka Barat)
	16.00 – 16.10	Rezi Prayoga	Pemekaran Desa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan

			Sosio-Kultural Masyarakat (Studi Pada Masyarakat 'Kundi Bersatu' Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat)	
14	16.20 – 16.30	Uzia Marti	Deeskalasi Konflik Antar Desa (Studi Terhadap Modal Sosial Sebagai Katup Penyelamat Konflik Di Kecamatan Air Gegas	
15	16.30 – 16.40	M. Afifulloh	Konstruksi Laki-Laki Pada Tubuh Perempuan Tokoh Utama <i>Novel Padang Bulan</i> Karya Andrea Hirata	
16	16.40 – 16.50	Ririn Anisa	Adaptasi Sosial Perempuan Muda Pasca Bercerai Di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah	

**NARASUMBER**

1. Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A.  
(Guru Besar Sejarah Universitas Gadjah Mada)
2. Prof. Dr. Bustami Rahman, M. Sc.  
Guru Besar Sosiologi Universitas Bangka Belitung)
3. Prof. Dr. Zulkifli Harmi, M.A  
(Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

**Susunan Panitia**

Pelindung	: Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si
Penanggung Jawab	: Dr. Ibrahim, M.Si
Ketua	: Sandy Pratama, M.Si
Sekretaris	: Luna Febriani, MA
Bendahara	: Rina Iryani, SE.
Koordinator Acara	: Sujadmi, MA
Koordinator Kesekretariatan	: Putra Pratama, M.PS.Sp
Koordinator Konferensi	: M. Afifulloh, M.Hum
Koordinator Humas	: Herdiyanti, M.Si.
Koordinator City Tour	: Rendy, MA
Koordinator Perlengkapan	: Feriadi, SP.

<p><b>Siti Chodijah</b> <i>UIN Sunan Gunung Djati Bandung</i> <i>Sitichodijah1221@gmail.com</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>MODEL PEMBINAAN KEAGAMAAN MELALUI BIMBINGAN PRIBADI SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA (Penelitian terhadap Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sukamiskin Bandung)</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Perilaku menyimpang dikalangan remaja sering terlihat di berbagai media maupun lingkungan sekitar. Fenomena tersebut dapat ditarik keterkaitannya dengan kesadaran beragama seseorang. Hal tersebut berdasarkan temuan kasus, remaja yang bermasalah sering meninggalkan ibadah. Padahal kesadaran beragama merupakan salah satu tugas perkembangan remaja yang harus dioptimalkan. Salah satunya dapat dioptimalkan melalui program bimbingan pribadi sosial.</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, evaluasi program bimbingan yang dihubungkan dalam konteks program bimbingan pribadi sosial dalam mengembangkan kesadaran beragama siswa. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan sebuah konsepsi program bimbingan pribadi sosial dalam mengembangkan kesadaran beragama siswa. Dasar pemikiran penelitian ini berpijak bahwa kesadaran beragama merupakan bagian integral dari aspek-</p>
---	---

	<p>aspek perkembangan remaja yang harus dikembangkan secara optimal. Tugas perkembangan remaja yang berkaitan dengan kesadaran beragama terdapat pada program bimbingan pribadi sosial. Karena salah satu tujuan bimbingan pribadi sosial adalah untuk menumbuhkan komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini diambil bermaksud mengungkap fakta-fakta yang nampak dilapangan dan dideskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai program bimbingan pribadi sosial dalam mengembangkan kesadaran beragama siswa. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menentukan populasi dan sampel, menentukan jenis dan sumber data, mengumpulkan teknik pengumpulan data, dan akhirnya mengolah dan menganalisis data.</p> <p>Hasil penelitian diperoleh, bahwa perencanaan program bimbingan telah melalui serangkaian tahapan yang sesuai dengan teori, meskipun masih terdapat tahapan perencanaan yang masih memerlukan pengembangan. Pada pelaksanaan bimbingan terdapat berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan kesadaran beragama seperti bimbingan kelas, konseling individu dan kegiatan pendukung lainnya. Adapun dalam proses evaluasi mencakup evaluasi proses dan hasil, namun masih terdapat aspek evaluasi yang masih memerlukan</p>
--	--

	<p>pengembangan. Sehingga sebagai upaya tindak lanjut dirumuskan pada konsepsi program bimbingan pribadi sosial dalam mengembangkan kesadaran beragama siswa. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa program bimbingan pribadi sosial diperlukan dalam mengembangkan kesadaran beragama siswa. Dengan serangkaian tahapan serta konsepsi program bimbingan sebagai tindak lanjut sebuah program bimbingan.</p> <p><b>Kata Kunci: Pembinaan, Pribadi Sosial, Karakter, Model</b></p>
<p><b>Putra Pratama Saputra</b>  <i>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN RUMAH PANGGUNG DI DESA AIR DUREN KABUPATEN BANGKA</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Kebudayaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari budaya Melayu. Beragam ikon budaya yang dimilikinya kental dengan ciri khas Melayu, termasuk rumah tradisionalnya yang bernama Rumah Panggung. Rumah panggung menjadi identitas masyarakat melayu Desa Air Duren. Disatu sisi globalisasi menimbulkan pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Perkembangan modernisasi yang terjadi menyebabkan perubahan pada nilai-nilai kebudayaan. Rumah panggung yang dulunya banyak berdiri tokoh, kini perlahan telah hilang secara satu per satu. Masyarakat yang memiliki modal besar lebih memilih membangun rumah dengan gaya arsitektur modern. Masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya rumah gaya arsitektur modern, maka akan meninggikan kelas sosial mereka. Padahal tanpa disadari hal</p>

	<p>tersebut secara perlahan dapat mengurangi bahkan menghilangkan nilai-nilai kebudayaan yang telah mereka percayakan sejak dahulu. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian rumah panggung di Desa Air Duren Kabupaten Bangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Penentuan informan menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan jumlah informan utama sebanyak 3 orang dan informan pendukung sebanyak 2 orang. Intervensi dilakukan dengan mencermati sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelestarian rumah panggung di Desa Air Duren Kabupaten Bangka. Berdasarkan hal tersebut, maka dirancang sebuah “Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan Perencanaan Partisipatif di Desa Air Duren Kabupaten Bangka”. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian rumah panggung di Desa Air Duren Kabupaten Bangka.</p> <p><b>Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pelestarian, dan Rumah Panggung.</b></p>
<p><b>Hadriana Marhaeni Munthe</b> <i>Universitas Sumatera Utara</i></p>	<p><b>FENOMENA KETIMPANGAN GENDER PADA MASYARAKAT PAKPAK</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Isu ketimpangan perempuan merupakan isu sosial bahkan suatu realitas yang</p>

	<p>dialami oleh sebagian besar kelompok perempuan sebagaimana halnya perempuan Pakpak yang berlatarbelakang masyarakat patriarki yang kuat menjalankan nilai adat. Ketimpangan gender menghadirkan situasi yang serius berupa kemiskinan pada perempuan Pakpak. Ketimpangan gender pada perempuan juga sangat terkait dengan sistem sosial dan budaya patrilineal yang mengandung sistem kekuasaan dan ideologi patriarki. Berkaitan dengan fenomena tersebut maka sejauh ini kajian isu ketimpangan gender serta kajian realitas kemiskinan perempuan Pakpak dalam konteks masyarakat Pakpak yang kental dengan nilai adatnya lebih dominan dikaji dalam dimensi kultural sedangkan dimensi struktural (akses dan kontrol perempuan) masih relatif minim dikaji. Padahal selain dimensi kultural maka dimensi struktural juga berpotensi mengkonstruksi struktur kemiskinan pada perempuan Pakpak.</p> <p>Terkait dengan fenomena isu ketimpangan gender maka studi ini mengkaji bagaimanakah posisi tawar perempuan mengambil keputusan di masyarakat adat Pakpak yang berlatarbelakang sistem dan struktur sosial patriarki. Kedua, studi ini juga mengelaborasi sampai sejauhmana posisi tawar tersebut memberikan dampak dalam kehidupan sosial perempuan Pakpak. Target khusus studi ini berupaya mengkonstruksi konsep ketimpangan perempuan yang bersumber dari pelbagai pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam konteks masyarakat Pakpak di pedesaan. Untuk tujuan dan target tersebut maka studi ini mengimplementasikan perspektif feminis baik dari segi teori maupun metode.</p>
--	---



	<p>Perspektif feminis secara komprehensif mengungkapkan bagaimana ketimpangan gender perempuan Pakpak dialami oleh perempuan dari lembaga keluarga (domestik) sampai pada lembaga adat (publik) bertolak dari sudut pandang (<i>standpoint</i>) perempuan sebagai subjek penelitian</p> <p>Berkenaan dengan perspektif tersebut maka studi ini mempergunakan metode kualitatif yang berperspektif feminis melalui studi kasus di desa Pegagan Julu VIII, Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Pengumpulan data primer digunakan triangulasi teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan pada perempuan Pakpak yang berkasus sebagai informan. Sedangkan teknik wawancara mendalam dilakukan pada informan kunci yaitu tokoh masyarakat, agama maupun adat sebagai sumber yang mengetahui bagaimana seluk-beluk terjadinya ketimpangan yang berpotensi memunculkan ketidakadilan pada perempuan di keluarga maupun lembaga adat masyarakat Pakpak. Selanjutnya luaran lainnya dari studi ini bisa dipublikasikan dalam jurnal nasional ataupun internasional.</p> <p><b>Kata kunci: Ketimpangan Gender, Relasi Gender, Kekerasan Perempuan dan Masyarakat Adat Pakpak.</b></p>
<p><b>Ahmad Jailani</b> <i>Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>INKLUSIVITAS DAN EKSKLUSIVITAS BATAS SOSIAL BUDAYA ETNIS TIONGHOA (STUDI TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI DESA AIR MENDUYUNG)</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Inklusivitas sosial merupakan cara</p>

	<p>masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosialnya yang cenderung terbuka dalam menerima perbedaan. Masyarakat yang inklusif lebih mudah dalam bergaul dan berbaur dengan masyarakat dilingkungannya, sedangkan eksklusivitas merupakan kebalikan dari inklusif yaitu suatu cara masyarakat dalam bergaul yang cenderung tertutup dalam memandang perbedaan dilingkungannya. Masyarakat yang eksklusif lebih membatasi dalam bersosial budaya dengan masyarakat dilingkungannya.</p> <p>Penelitian ini menggunakan teori paguyuban dan patembayan yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies. Dalam teorinya Tonnies menjelaskan bahwa paguyuban terjadi pada masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan batin yang kuat serta memiliki hubungan darah antar anggotanya. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran pustaka. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif.</p> <p>Hasil menunjukkan bahwa Masyarakat Etnis Tionghoa di Dusun Anyai Desa Air Menduyung memiliki sifat yang dominan inklusif khususnya untuk beberapa sisi seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan pemerintahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pergaulan dan geografis. Sedangkan untuk sisi agama masyarakat Etnis Tionghoa bersifat eksklusif hal tersebut kerna perbedaan agama antar masyarakat Desa Air Menduyung sehingga ada hal-hal yang</p>
--	--

	<p>memang tidak bisa dihindarkan dan tidak bisa dijalankan bersama-sama. Pada masyarakat Etnis Tionghoa Desa Air Menduyung masyarakat lebih dominan bersifat patembayan khususnya dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan pemerintahan. Dalam segi agama masyarakat Etnis Tionghoa cenderung paguyuban karna terjadi atas dasar hubungan kepentingan semata yang menyebabkan adanya timbal balik yang bersifat sementara sebagaimana yang telah dibahas pada penelitian ini.</p> <p>Kata kunci: Etnis Tionghoa, Inklusivitas dan Eksklusivitas.</p>
<p><b>Iwan Nurhadi</b>  <i>Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya</i>  <i>iwana.nurhadi@ub.ac.id</i></p>	<p><b>ETHNO-SCIENCE PEMANFAATAN NILAI-NILAI LOKAL SEBAGAI STRATEGI MITIGASI BENCANA DI DATARAN TINGGI JAWA TIMUR</b></p> <p><b>ABSTRAK</b>  Tulisan ini berupaya mengidentifikasi pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dalam hubungannya dengan kebencanaan. Tujuan tulisan ini untuk mengidentifikasi, menggali dan merumuskan model pengurangan risiko bencana (<i>disaster risk reduction</i>) berbasis kearifan lokal masyarakat setempat. Kondisi geografis Indonesia yang terletak di peta rawan bencana mengharuskan adanya sinergi antara kajian bencana dari perspektif geologi dan perspektif ilmu sosial – sosiologi, antropologi dan komunikasi. Fenomena ini memberikan kontribusi pada studi kebencanaan dari perspektif sosiologi yang memfokuskan pada bagaimana manusia/kelompok manusia memberikan tanggapan atas kejadian bencana. Melalui observasi partisipan moderat, peneliti mencoba</p>

	<p>untuk mengidentifikasi pengetahuan lokal apa yang masih dipercaya oleh masyarakat dan apa implikasinya pada perilaku siaga bencana. Kekuatan hubungan antara penduduk dengan tempat tinggal mereka disinyalir menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk tetap bertahan di tengah ancaman bencana. Pada titik inilah pengetahuan lokal (<i>local knowledge</i>) menyumbangkan ide untuk masyarakat dalam menjalankan rutinitas dan aktivitas kehidupan sosialnya. Dalam konteks pengetahuan lokal perlu dipahami posisi dan peran sistem simbol, dialektika dalam konteks komunikasi lokal untuk menemukan makna <i>bencana</i> bagi masyarakat lokal. Hal tersebut merupakan salah satu penerapan yang dilihat melalui sudut pandang masyarakat lokal (<i>native's point of view</i>). Melalui penggalian sudut pandang orang lokal ini diharapkan akan mampu merancang model pengurangan risiko bencana berbasis pengetahuan lokal. Model pemulihan bencana berbasis pengetahuan lokal dimungkinkan untuk diterapkan di tiap-tiap negara yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan budaya lokal yang ada. Tulisan ini berangkat dari penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi yang mengandalkan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil yang diharapkan adalah bentuk-bentuk pengetahuan lokal yang pernah dan masih dimiliki oleh masyarakat Desa Ngadas dan Desa Pandansari Kabupaten Malang sebagai pengetahuan tentang bencana. Di sisi lain, hal tersebut membuktikan bahwa kejadian kebencanaan sesungguhnya bukan hanya sekedar kejadian natural akibat alam,</p>
--	---

	<p>namun di dalamnya terdapat aspek-aspek sosial-ekonomi. Hal itu terlihat dari pola strategi bertahan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat.</p> <p><b>Kata Kunci: Local Knowledge, Mitigasi Bencana, Sosiologi Budaya, Pendidikan Bencana.</b></p>
<p><b>Herdiyanti</b>  <i>FISIP Universitas Bangka Belitung</i>  <b>Jamilah Cholilah</b>  <i>FISIP Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>PERGESERAN MODAL SOSIAL  DALAM PELAKSANAAN  UPACARA ADAT MANDI  BELIMAU DI DUSUN LIMBUNG  DESA JADA BAHRIN KECAMATAN  MERAWANG KABUPATEN  BANGKA  ABSTRAK</b></p> <p>Praktik upacara adat mandi belimau merupakan salah satu ritual adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Dusun Limbung menjelang bulan puasa ramadhan. Ada kekhasan yang muncul dari praktik upacara adat ini yaitu partisipasi masyarakat dalam memeriahkan kegiatan ritual adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang pergeseran modal sosial dalam pelaksanaan upacara adat mandi belimau di Dusun Limbung, Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang saat ini diahlikan pelaksanaannya di Desa Kimak. Teori yang digunakan untuk menganalisis dinamika dalam pelaksanaan upacara adat mandi belimau yaitu teori modal sosial Fukuyama. Adapun metode penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi terlibat, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi sebagai data sekunder.</p>

	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara adat mandi belimau dapat menyatukan elemen-elemen masyarakat dalam memeriahkan kegiatan. Upacara adat disinyalir menjadi modal sosial masyarakat dalam menciptakan keharmonisan sosial. Namun, upacara adat ini mengalami pergeseran terkait dengan pelaksanaan upacara atau ritual mandi belimau yang ada di Dusun Limbung, Desa Jada. Kondisi ini disebabkan beberapa factor salah satu diantaranya yakni perubahan pola pikir masyarakat yang semakin berkembang dan realistis terhadap pelaksanaan upacara adat mandi belimau. Pola pikir ini menyebabkan modal sosial masyarakat mengalami pergeseran sehingga ritual upacara adat mandi belimau diahlikan di Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Dinamika pergeseran modal sosial ini memunculkan beberapa respon dari masyarakat umum yang dirasakan sangat subjektif.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Social Capital, Upacara Mandi Belimau, Pergeseran</i></p>
<p><b>Devi Sihotang</b> Prodi Magister Sosiologi FISIP Universitas Sumatera Utara</p> <p><b>Rizabuana Ismail</b> Prodi Magister Sosiologi FISIP Universitas Sumatera Utara</p> <p><b>Ria Manurung</b> Prodi Magister Sosiologi FISIP Universitas Sumatera Utara</p>	<p style="text-align: center;"><b>MEREPOSISI DAN MELESTARIKAN KEBERADAAN “NAMALO” DALAM MELAKUKAN PENGOBATAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROPINSI SUMATERA UTARA</b></p> <p><b>ABSTRAK</b> Saat ini keberadaan <i>Namalo</i> yang merupakan pengobat tradisional, seorang yang mengobati penduduk dengan ramuan tradisional, di daerah Batak Toba</p>

	<p>mulai punah. Citranya yang identik dengan ritual mistis dan dianggap menyimpang dari ajaran agama membuat masyarakat Batak Toba mulai meninggalkan pengobatan tradisional. Akan tetapi, saat ini pengobatan tradisional yang menggunakan ramuan herbal atau tanaman sekitar menjadi isu penting di dunia kesehatan sebagai alternatif atau pelengkap pengobatan modern. Keberadaan <i>Namalo</i> yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional menjadi penting dan ritual mistis tersebut tidak lagi dipraktekkan sebagai bagian dari pengobatan. Jika keberadaan <i>Namalo</i> dibiarkan punah, maka hal tersebut dapat menghambat pengembangan penelitian tentang obat-obatan, khususnya ramuan tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pengetahuan <i>Namalo</i> sebagai sebuah bentuk kearifan lokal dalam pengobatan tradisional yang keberadaannya penting untuk dijaga dalam pengembangan penelitian obat-obatan. Hal ini sesuai dengan Program Kerja Kementerian Kesehatan 2015. Penelitian ini untuk mengetahui cara mendiagnosis pasien, peracikan ramuan, dan pengobatan yang dilakukan serta untuk melihat apakah masih dilakukan penggunaan mantra atau ritual pemanggil roh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan <i>Namalo</i> merupakan pengobat tradisional yang menyembuhkan sakit pasien baik penyakit dalam maupun patah tulang tanpa menggunakan hal-hal yang bersifat mistis selama proses pengobatannya. Proses pengobatan dilakukan di rumah <i>Namalo</i> namun ada juga <i>Namalo</i> yang</p>
--	--

	<p>akan melakukan pengobatan di rumah pasien jika kondisi pasien parah. Pengobatan yang dilakukan oleh <i>Namalo</i> ada yang menggunakan ramuan herbal yang diolah oleh <i>Namalo</i> dan ada juga yang diolah sendiri oleh pasien sesuai dengan petunjuk <i>Namalo</i>. Penyempurnaan proses pengobatan <i>Namalo</i> dilakukan dengan memberikan pantangan/larangan bagi pasien mengenai makanan yang dapat dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi.</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Namalo</i>, pengobatan tradisional, tanaman herbal</p>
<p><b>Nurvita Wijayanti</b> <i>FISIP Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>ANALISIS PENDEFINISIAN DIKSI LOKAL DALAM UPAYA PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DALAM NOVEL <i>RAINBOW TROOP</i> OLEH ANDREA HIRATA: STUDI TERJEMAHAN BERBASIS KULTURAL</b></p> <p><b>ABSTRAK</b> Terjemahan yang berdasarkan pada kebudayaan selalu menjadi hal yang penuh intrik. Kebudayaan selalu menjadi hal yang unik karena kemunculannya pada format terjemahan. Ini bertendensi menjadikan bahasa target menjadi bahasa yang memiliki kuasa yang lebih tinggi. Homi Babha mengatakan bahwa inilah yang disebut sebagai proses kolonial dan post-kolonial yang tidak sesuai dan bahasa campuran. Bahasa target selalu memiliki kuasa yang lebih tinggi untuk mengontrol bahasa asal untuk menerjemahkan kata, frasa, ekspresi, dan kalimat. Akan tetapi, tantangannya adalah bagaimana menjaga ke-khas-an lokal. Oleh karena itu, penelitian ini</p>



	<p>menganalisis diksi atau pilihan kata pada bahasa sumber yang terjaga keasliannya. Analisa ini berdasarkan pada ranah linguistik dan budaya. Daftar pilihan kata didata dan dianalisis berdasarkan pada linguistik dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan budaya dan metodenya adalah analisis kualitatif. Pilihan kata yang ada di Novel Laskar Pelangi atau <i>Rainbow Troop</i> yang ditulis dan diterjemahkan oleh Andrea Hirata tetap terjaga keaslian bahasanya. Penulis tampaknya menggunakan diksi yang tidak diterjemahkan untuk melestarikan diksi lokal. Secara budaya, diksi-diksi tersebut adalah perwakilan dari diksi kedaerahan khususnya di Kepulauan Bangka Belitung dimana seting tempat pada novel berada. Secara kebahasaan, diksi-diksi tersebut tidak memiliki perbandingan yang sepadan dengan bahasa target sehingga sangat sulit untuk mendefinisikannya ke dalam deskripsi lengkap pada bahasa target.</p> <p><b>Kata Kunci: Diksi, Terjemahan, Novel Rainbow Troop, Kultural</b></p>
<p><b>Widya Handini</b> <i>Alumnus Southampton University, UK</i></p>	<p><b>THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STRATEGIES (FOOD SECURITY AND HOUSEHOLDS' WELL-BEING IN LAPEDRERA. AMAZONAS (COLOMBIA)</b></p> <p><b>ABSTRACT</b> Food insecurity is understood as a “lack of secure access to adequate amounts of safe and nutritious food for normal growth and healthy life”. Despite the natural riches of their surroundings, Amazonian indigenous peoples are threatened by changes in environment and socio-ecological transformation</p>

	<p>which leads to food insecurity in their population. Taking a case study approach, this paper addresses the following research questions: what is the prevalence of perceived food insecurity in the La Pedrera region of the Colombian Amazon? How do food-insecure households in La Pedrera cope with food insecurity? What is the relationship between the community location, gender of the household head, the household's socioeconomic category and the coping strategies used by the household? Secondary data from a questionnaire survey of 159 households in La Pedrera, Colombia, was analysed. A Coping Strategies Index (CSI) was developed based on the type and frequency of coping strategy used by households. The study found that 47.5% of households experienced food insecurity and used 14 different coping strategies to mitigate shortages of food. Gender of household head did not influence the perceived incidence of food insecurity but female-headed households had a significantly higher CSI score, indicating that they resorted to strategies associated with more severe hunger. Food insecurity was more common, but not significantly so, in the lower socioeconomic category. However, when food insecurity occurred in any socioeconomic category, the severity was similar. Overall, higher food insecurity/CSI score was not strongly predicted by the socioeconomic level or the gender of the household head. An apparent effect of proximity to the local town (leading to greater perceived food insecurity) deserves further research. The study concluded that the resultant effects of food insecurity are a big challenge to the</p>
--	---

	<p>government and need a more comprehensive strategy focusing on La Pedrera.</p>
<p><b>Moh.Rafli Abbas</b> <i>FISIP Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>POLITIK KEDAULATAN PANGAN BERBASIS AGROPOLITAN (Strategi Dan Intervensi Kebijakan Pemerintah Propinsi Gorontalo Dalam Sentra Komoditas Jagung)</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>This study is the success and achievement of Dr. Fadel Muhammad as the Governor who is able to take down Gorontalo Province as one of the pilot areas in a policy breakthrough that includes the opening of international corn product market opportunity. The Strategic Plan of Gorontalo Provincial Government is the elaboration of the Regional Development Program (Properda) in accordance with the Regional Strategic Planning (Renstra) of Gorontalo Province Province in 2002-2006, which serves as a reference for all provincial government apparatuses for funding to organize the government, management of development and community services in the province of Gorontalo . This study uses the approach of Government Policy through the Global Value Chain Method (GVC) which is the pattern of power asymmetry relation between local government, the private sector, and society, in a value chain.</p> <p>Forms of agropolitan policy intervention strategy are as follows: First, Provide agricultural tools and machinery in the form of Agricultural Machine and Machinery Service Unit (UPJA) and Agropolitan Transportation; Secondly, Provide Farmers Loan Fund through</p>

	<p>APBD, Askrido, Bank BRI, Bank Mandiri, and Bank BNI; Third, Creating Market (Market Creation) of corn and the determination of the basic price of maize; Fourth, Establish a corn pilot (Show Window Maize) in each regency and Posko Agropolitan; Fifth, Planning and Coordination in order to improve policy alignment.</p> <p><b>Keyword: Global Value Chain, Agropolitan, Policy Coherence</b></p>
<p><b>Aimie Sulaiman</b> <i>Universitas Padjadjaran</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>RATIONALITY BEHIND IRRATIONALITY MENYASAR DUKUN KAMPONG BELITUNG DALAM KONSEP WORLD VIEW WEBER</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Dukun kampung sebagai entitas sosial dan budaya dalam masyarakat Belitung memiliki posisi nilai tawar yang cukup signifikan. Keberadaan mereka tidak hanya sekedar mengisi ruang-ruang kehidupan sosial budaya namun juga pengaruh dan penentu secara politis. Secara sosial mereka diposisikan sebagai tokoh masyarakat atau pemimpin informal pada tiap-tiap kampung. Secara budaya, dukun kampung merupakan bagian dari adat istiadat orang Belitung dimana mereka diposisikan sebagai penjaga kampung yang memiliki kuasa untuk mengatur tata kehidupan sosial budaya. Secara politis, dukun kampung menjadi simbol bagi legitimasi suatu kegiatan atau pengambilan kebijakan tertentu. Keberadaan dukun kampung bagi sebagian besar masyarakat Belitung sudah terinternalisasi dalam sistem sosial budaya mereka sehingga kepercayaan mereka kepada dukun kampung tidak tergerus sampai saat ini. Jelas terlihat</p>

	<p>bahwa beberapa urusan kehidupan mereka gantungkan pada para dukun kampung. Beberapa urusan tersebut diantaranya adalah sakit yang diderita, keselamatan keluarga dan harta benda, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, bahkan kepada dukungan-dukungan politik. Kepercayaan masyarakat terhadap dukun kampung yang tergambar pada sistem tindakan mereka, secara akademik dapat dikatakan tidak rasional atau diluar batas nalar. Namun faktanya sistem kepercayaan yang terwarisi secara turun menurun tersebut sampai saat ini masih terjaga atas nama “kenyamanan” bagi hubungan-hubungan sosial yang terjalin. Membaca konsep <i>world view</i> yang dikemukakan Weber akan membantu kita untuk memahami sistem tindakan masyarakat Belitung tentang keberadaan dukun kampung. Inilah yang akan mengantarkan kita pada pemahaman rasionalitas dibalik irasionalitas.</p> <p><b>Kata kunci: Dukun Kampung, Sistem Tindakan, World View</b></p>
<p><b>Ahmad Yusuf</b> <i>Universitas Gadjah Mada</i></p>	<p><b>KOMUNITAS HIJABERS BABEL DALAM TELAAH POSTMODERNISME JEAN BAUDRILLARD</b></p> <p><b>ABSTRAK</b> Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif menjelaskan tentang Komunitas Hijabers Babel dalam telaah postmodernisme Jean Baudrillard. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena Komunitas Hijabers Babel di Pangkalpinang yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka perempuan yang memakai hijab melalui gaya hijab dan</p>

	<p>busana muslim yang modern dan tidak ketinggalan zaman. Baudrillard dalam teori simulasi dan hiperrealitas nya mengatakan bahwa konsep simulasi sangat erat kaitannya terhadap Komunitas Hijabers Babel. Peneliti melihat bahwa untuk menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat Komunitas ini memakai seragam yang sama dengan gaya yang modis dan elegan, sehingga menjadikan mereka manusia satu dimensi. Konsep simulasi ini mampu menjadikan keberadaan citra mengalahkan yang asli. Dalam dunia wacana simulasi, batas antara yang nyata dengan yang imajiner atau palsu, tiruan tidak hanya berbaur, akan tetapi simulasi atau citraan lebih unggul dan lebih dipercaya dari fakta. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Komunitas Hijabers Babel ini, untuk mempertahankan eksistensinya menggunakan dua simbol yaitu bahasa dan seragam sebagai penanda atau identitas dari keberadaan mereka. Selain bahasa dan seragam, Komunitas ini juga melakukan berbagai kegiatan positif untuk mendukung eksistensi mereka seperti tutorial hijab <i>talk show</i>, bakti sosial, kumpul bersama, praktik keagamaan, dan bisnis. Bahasa dan seragam berupa hijab yang modis dengan warna dan corak yang bervariasi kemudian menjadi komoditas komersial yang membuat perempuan menjadi termotivasi untuk berhijab. Hijab yang dulunya terlihat ketinggalan zaman dan tidak menarik kini telah berubah menjadi gaya busana muslim yang modern dan anggun. Pada akhirnya perempuan yang tergabung dalam Komunitas Hijabers Babel berhijab bukan hanya semata karena perintah Allah Swt, akan tetapi</p>
--	---

	<p>dipengaruhi juga oleh jenis dan motif hijab yang dikomodifikasi serta terlihat elegan bila memakainya.</p> <p><b>Kata Kunci: Komunitas Hijabers Babel, Simulasi, dan Eksistensi, Komoditas</b></p>
<p><b>Fitri Ramdhani Harahap</b> <i>Universitas Sriwijaya Palembang</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>KOSMOLOGI DAN MITOLOGI SUKU LOM</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Kosmologi dan mitologi yang dimiliki oleh Suku Lom merupakan sebuah titik acuan yang menjadi norma-norma dalam berperilaku, titik acuan ini merupakan pola keyakinan kolektif yang berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial. Aturan dan keyakinan yang muncul dalam konsep kosmologi dan mitologi ini menjadi acuan yang paling dasar dalam bersosialisasi khususnya yang berkaitan dengan lingkungan alam bagi Suku Lom. Oleh karena itu, dengan melakukan kajian mengenai aturan dan keyakinan dalam konsep kosmologi dan mitologi Suku Lom dapat menggali berbagai bentuk kearifan-kearifan lokal yang menjadi potensi-potensi sosial yang dapat bermanfaat untuk menjawab tantangan dan permasalahan global. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk mempertahankan eksistensi Suku Lom sebagai penduduk asli di Pulau Bangka yang memiliki kebudayaan yang unik dan khas. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam mengkaji konsep kosmologi dan mitologi Suku Lom sebagai perwujudan aturan keyakinan dalam bentuk kearifan lokal adalah penggunaan metode etnografi. Metode ini berupaya mempelajari dan menemukan makna</p>

	<p>tindakan budaya Suku Lom yang diekspresikan melalui upaya-upaya untuk selalu harmonis dan selaras dengan lingkungan alam mereka. Studi ini menghasilkan temuan mengenai bentuk-bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh Suku Lom dalam upaya agar dapat hidup harmonis dan selaras dengan lingkungan alam mereka yaitu tertuang dalam konsep kosmologi terkait keyakinan mengenai awal mula penciptanaan alam, aturan serta keyakinan mengenai pengaturan ruang dan waktu serta keyakinan mengenai dinamika kosmos menurut pandangan Suku Lom. Kemudian terkait konsep mitologi, aturan dan keyakinan yang dimiliki oleh Suku Lom berkaitan dengan alam yaitu mengulas tentang bentuk-bentuk mitos, keyakinan mengenai konsep mitos dan tanda mitos menurut Suku Lom.</p> <p><b>Kata Kunci: Suku Lom, Kosmologi, Mitologi, Kearifan Lokal</b></p>
<p><b>Beni Ritiauw</b> <i>Universitas Gadjah Mada</i></p>	<p><b>PERDAMAIAN BERBASIS ADAT DI HILA SALAM-SARANE</b></p> <p><b>ABSTRAK</b> Negeri Hila Salam-Sarane dan Kaitetu (Islam-Kristen) merupakan salah satu dari sekian banyak daerah di Ambon Maluku yang memiliki keunikan dalam mengkonstruksi tipologi sosialnya. Keunikan tersebut tercermin melalui pola tindakan integratif yang menegaskan tendensi agama dalam setiap proses sosial. Bukan tidak mungkin, kesatuan ideologi dalam kerangka <i>Hidup Orang Basudara</i> (Hidup Bersaudara) menjadi aktor utama dalam tercapainya sifat integratif yang tentunya menjadikan nilai-nilai adat sebagai basisnya. Lembaran sejarah yang tidak bisa</p>



	<p>dilupakan ketika masyarakat Hila Sarane (Kristen) terafiliasi ke dalam sistem adat Hila Salam (Islam), masyarakat Hila Sarane (Kristen) mempunyai tanggung jawab sosial-kultural dalam proses pembangunan Masjid masyarakat Kaitetu (Islam), pertalian sosial antar masyarakat sejak masa penjajahan, dan lain sebagainya, menjadi modal dalam pembentukan <i>collective consciousness</i> berbasis nilai-nilai kultural dalam menafsirkan dan mengkonstruksi dunia yang ideal. Namun fakta kehidupan yang digambarkan tersebut mengalami guncangan yang luar biasa ketika pecahnya konflik berdarah antara dua kelompok besar yaitu Islam dan Kristen di Kota Ambon dan sekitarnya pada Tahun 1999. Distorsi makna <i>Hidup Orang Basudara</i> (Hidup Bersaudara) menjadi tidak terelakkan ketika masing-masing orang berdiri, membela, dan membantai orang lain berdasarkan identitas agama. Panasnya dinamika konflik menjadikan masyarakat Hila Salam-Sarane dan Kaitetu sebagai kelompok masyarakat yang terdampak oleh konflik sehingga memungkinkan adanya segregasi teritorial masyarakat Hila Sarane (Kristen). Penelitian ini bertujuan untuk melihat maksimalisasi nilai-nilai adat dalam proses perdamaian sesuai dengan konstruksi dunia ideal masyarakat Hila Salam-Sarane dan Kaitetu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) nilai-nilai adat yang dipegang oleh kelompok masyarakat lintas agama (Hila Salam-Sarane dan Kaitetu) mampu menciptakan perdamaian jangka panjang. (2) adanya disparitas dalam pemaknaan konsep Islam-Kristen (teologis) dan</p>
--	--

	<p>Salam-Sarane (kultural) guna menciptakan perdamaian berbasis adat. (3) sifat mengikat dari sistem adat membentuk pola hidup masyarakat yang integratif. (4) adanya tanggung jawab sosial-kultural yang mewadahi hancurnya sekat pembatas dalam membangun relasi berbasis agama dan teritorial. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah penafsiran akan makna dari sistem adat telah membangun sebuah kerangka kehidupan lintas agama yang kokoh dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan yang terkadang kontra eksistensi.</p> <p><b>Kata Kunci: Perdamaian, Integrasi, Adat</b></p>
<p><b>Muliadi</b> <i>Univeristas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>ANALISIS RELASI SOSIAL PADA MASYARAKAT GATED COMMUNITY DI KOTA PANGKALPINANG (STUDI DI PERUMAHAN GRAHA PURI KOTA PANGKALPINANG)</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Relasi sosial adalah hasil dari rangkaian interaksi dan tingkah laku individu yang sistematis antara dua orang atau lebih, relasi sosial merupakan syarat untuk terjadinya aktivitas sosial yang dilakukan melalui proses interaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk relasi sosial pada masyarakat gated community dan mendeskripsikan permasalahan relasi sosial di Graha Puri Kota Pangkalpinang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal sosial James Coleman. Teori ini menjelaskan tentang tindakan yang didasari dengan konsep</p>

	<p>pilihan rasional, resiprositas dan relasi. Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini 17 orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi sosial pada masyarakat gated community berjalan layaknya pada masyarakat umumnya. Hal ini terlihat dari berjalannya bentuk-bentuk relasi sosial yang pertama, kerja sama seperti gotong royong membersihkan halaman dan menata cluster yang dilakukan masyarakat gated community. Kedua organisasi, organisasi seperti kepengurusan dicluster yang dibentuk oleh masyarakat, hal ini merupakan sebagai bentuk relasi yang dijalankan masyarakat gated community. Ketiga media sosial elektronik, media sosial yakni group dimedia sosial elektronik seperti BBM, dan Whatupp. Keempat kerumunan, kerumunan yang dilakukan masyarakat gated community seperti kerumunan dengan berdiskusi dan bermain Catur, Gapple. Tentunya dari empat bentuk tersebut didorong oleh faktor internal dan faktor eksternal, yakni faktor internal seperti imitasi, simpati, motivasi dan identifikasi, dan faktor eksternal terdiri faktor pertentangan (konflik) dan faktor lingkungan perumahan. Berdasarkan fakta di lapangan empat bentuk relasi sosial tersebut yang dijalankan masyarakat gated community Graha Puri Kota Pangkalpinang.</p>
--	--

	<p><b>Kata kunci: Relasi sosial, Masyarakat, Gated Community</b></p>
<p><b>Iskandar Zulkarnain</b>  <i>Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor</i></p>	<p><b>PESONA KOMUNITAS ADAT DIANTARA PERJUANGAN OTONOMI DAN KUASA PASAR</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Komunitas adat sebagai representasi petani kecil sedang berjuang mencapai otonomi karena terkendala struktur yang menindas dan dominatif. Secara internal, komunitas adat mengalami proses transformasi sosial akibat konflik tenurial berkepanjangan yang memaksa mereka bernegosiasi tentang identitas. Secara eksternal, perselingkuhan antara negara, industri, dan pasar yang mengemuka lewat pemberian izin konsesi oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan besar yang dipayungi seperangkat regulasi dan kebijakan yang seringkali berubah-ubah menunjukkan corak kapitalisme agraria transaksional. Himpitan struktur yang ada memudahkan pesona kebangkitan adat di era reformasi yang sedang melesat. Melalui analisis kualitatif dan interpretasi kritis peneliti hendak menawarkan alternatif jalan keluar.</p> <p>Peneliti menemukan bahwa kolaborasi antara negara, industri, dan pasar yang melahirkan dominasi (empire) melalui perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, melalui mekanisme tindakan otoriter dengan mengubah pengelolaan koperasi plasma dari semula berbasis kelompok/komunitas adat menjadi milik individu memunculkan "repeasantization". <i>Repeasantization</i></p>

	<p>merupakan ekspresi perjuangan komunitas adat untuk otonomi dan upaya bertahan hidup akibat dominasi <i>empire</i> yang menciptakan kesenjangan dan ketergantungan. <i>Repeasantization</i> merupakan ekspresi gerakan perlawanan dua arah, yaitu dari atas (pemerintahan dan kebijakan) dan gerakan ke bawah (mobilisasi massa di aras bawah) yang bertujuan merebut kesejahteraan melalui upaya-upaya untuk menghasilkan pendapatan non-pertanian (agribisnis) untuk diinvestasikan di sektor pertanian tradisional.</p> <p>Kata Kunci: dominasi, kapitalisme agraria, <i>repeasantization</i>, perlawanan</p>
<p><b>Masni</b> <i>Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BERBASIS MODAL SOSIAL (STUDI PADA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI DESA TERAK KABUPATEN BANGKA BARAT)</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Destinasi wisata merupakan suatu tempat yang spesifik dan memiliki keunikan untuk dijadikan tujuan wisata. Keunikan yang terdapat pada suatu objek wisata perlu adanya pengembangan untuk membuat menjadi lebih baik dan menarik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penunjang, mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal dan untuk menganalisis modal sosial masyarakat dalam upaya pengembangan destinasi wisata di Desa Bukit Terak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal sosial Pierre Bourdieu. Modal sosial merupakan segala sumberdaya aktual dan maya yang menjadi jaringan yang kuat dan tahan lama serta yang berhubungan</p>

	<p>timbang balik. Teori ini menjelaskan tentang konsep habitus, arena sosial dan modal sosial. Modal sosial memiliki tiga unsur yaitu nilai, norma dan kepercayaan. Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan yang ditentukan dalam penelitian ini berjumlah 16 informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu pertama, terdapat faktor-faktor yang menunjang pengembangan destinasi wisata yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa sumberdaya alam, budaya masyarakat lokal dan tingginya solidaritas masyarakat, sedangkan faktor eksternal berupa keterlibatan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Pusat Provinsi. Kedua, terdapat partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan destinasi wisata yang ada seperti partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif terdiri dari gotong-royong, keterlibatan dalam pengelolaan dan penjagaan, sedangkan partisipasi pasif berupa sumbangan dana. Ketiga, adanya modal sosial masyarakat lokal dalam upaya pengembangan destinasi wisata yaitu modal sosial potensial dan modal sosial aktual. Modal sosial potensial berupa kerajinan dan kesenian, sedangkan modal sosial aktual seperti keramah-tamahan dan kepercayaan. Dari ketiga hasil tersebut memiliki peran yang penting dalam upaya pengembangan destinasi wisata di Desa Bukit Terak.</p>
--	---

	<p><b>Kata Kunci: Pengembangan, Modal Sosial, Pariwisata</b></p>
<p><b>Herza</b> <i>Universitas Gadjah Mada</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>FENOMENA TENGGULAK PEREMPUAN DI KELURAHAN TUATUNU INDAH KOTA PANGKALPINANG</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Penelitian ini ingin melihat dan mengkaji secara mendalam mengenai fenomena tengkulak perempuan (salah satu wujud dari kearifan lokal) yang sudah ada sejak lama di Kelurahan Tuatunu Indah. Fenomena ini merupakan fenomena sosial-ekonomi yang unik karena hampir semua ibu-ibu di kelurahan ini tertarik dan menggeluti pekerjaan tengkulak tersebut. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ibu-ibu di Kelurahan Tuatunu Indah lebih memilih bekerja sebagai tengkulak daripada melakukan aktivitas ataupun pekerjaan lainnya merupakan fokus utama dari penelitian ini.</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan penggambaran secara mendalam mengenai fenomena yang diangkat dalam penelitian. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara beberapa informan yang ditentukan dengan metode <i>purposive sampling</i>. Teori yang digunakan untuk mengkaji fenomena ini, yaitu Teori Tindakan Sosial dan Rasionalitas karya Max Weber. Tindakan Sosial merupakan perbuatan manusia yang dilakukan untuk mempengaruhi individu lain di dalam masyarakat dan sebuah tindakan yang penuh makna subjektif bagi pelakunya. Sedangkan Rasionalitas lebih mengarah</p>

	<p>ke pola pikir dan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tertata dan penuh perhitungan, baik itu dalam hal untung rugi ataupun resiko dari sebuah tindakan. Hasil penelitian menunjukkan sejarah dan dinamika perkembangan tengkulak perempuan (sebagai salah satu wujud kearifan lokal), cara dan sistem kerja yang mereka terapkan, modal dan keuntungan yang mereka dapatkan, peran ganda yang mereka mainkan serta bagaimana aktivitas-aktivitas sebagai tengkulak ini lebih mengarah kepada tindakan sosial rasionalitas instrumental. Selain itu, hal yang paling terpenting dalam penelitian ini, ditemukannya lima faktor penyebab mayoritas ibu-ibu di Kelurahan Tuatunu Indah memilih untuk bekerja sebagai tengkulak, yaitu faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor geografis, faktor persepsi dan faktor kebiasaan. Lima faktor tersebut ketika dihubungkan dengan teori rasionalitas dari karya Max Weber, baik itu rasionalitas secara umum ataupun hasil identifikasi dari Stephen Kelberg menunjukkan bahwa hal yang mendasar ataupun hal fundamental menyebabkan mayoritas ibu-ibu memilih bekerja sebagai tengkulak, yaitu pola pikir yang sangat rasional. Lebih spesifiknya mereka termasuk ke dalam golongan masyarakat yang telah mempraktikkan rasionalitas substantif.</p> <p><b>Kata Kunci: Tengkulak Perempuan, Tindakan Sosial dan Rasionalitas</b></p>
<p><b>Sandy Pratama</b> Dosen Program Studi Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung <a href="mailto:sandy_djarib@yahoo.co.id">sandy_djarib@yahoo.co.id</a></p>	<p><b>TABER LAOT DAN PENGEMBANGAN WISATA PANTAI GUSUNG; POLITIK RESISTENSI PERTAMBANGAN LAUT DI DESA BATU BERIGA, BANGKA</b></p>



	<p style="text-align: center;"><b>TENGAH</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Konsep SDG's atau pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah diskursus yang sedang massif dikembangkan dalam berbagai bidang sebagai sebuah upaya penguatan pembangunan kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia. Dalam beberapa konteks lokal, sejatinya konsep tersebut sangat selaras dengan berbagai tata perilaku, persepsi, serta norma kebiasaan yang dianut dan dipelihara oleh komunitasnya. Penetrasi pembangunan ekonomi yang berorientasi <i>shortenism</i>, terutama dalam eksploitasi sumber daya alam, seringkali menjadi predator bagi eksistensi kearifan lokal yang seringkali menjadi penopang utama praktik-praktik pembangunan yang lebih lestari dan berkelanjutan. Studi ini mengangkat sebuah kasus menarik yang terjadi di Desa Pesisir Batu Beriga, dimana seperti daerah-daerah pesisir lain di Pulau Bangka, yang selama bertahun-tahun berhadapan dengan polemik penambangan mineral <i>vis a vis</i> kelestarian laut sebagai wilayah tangkap para nelayan desa. Dengan melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan, penelitian ini kemudian mendeskripsikan upaya perlawanan yang dilakukan oleh komunitas lokal untuk menggagalkan setiap rencana usaha eksploitasi timah demi terjaganya kualitas lingkungan, terutama wilayah laut Batu Beriga yang menjadi wilayah <i>fishing ground</i> dan pemanfaatan ekonomi kelautan dan perikanan lainnya. Studi ini menemukan sebuah strategi efektif yang dijalankan oleh pemimpin lokal sebagai sebuah politik resistensi penambangan</p>
--	--

	<p>laut dengan mensakralkan secara substansif upacara adat tahunan “Taber Laot” dimana pada hari-hari tertentu tidak boleh ada aktivitas apapun di wilayah laut tersebut. Strategi lain yang dilakukan adalah dengan mengembangkan Pantai Gusung menjadi sebuah objek tapak wisata potensial yang dapat menjadi landasan bagi upaya perlindungan laut yang menjadi kehendak utama masyarakat Desa Batu Beriga. Harapan besar yang sedang dinanti oleh warga adalah dukungan kebijakan dari pemerintah daerah yang mendukung upaya-upaya perlindungan laut ini, baik dalam tataran hukum maupun ekonomi politik.</p> <p><b>Kata Kunci: Politik Resistensi, Perlindungan Laut, Adat, Kebijakan</b></p>
<p><b>Nur Dyah Gianawati</b>                  Email: <a href="mailto:nurdyahgianawati@yahoo.co.id">nurdyahgianawati@yahoo.co.id</a>                  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik                  Universitas Jember</p> <p><b>Ardiyanto</b>                  Email: <a href="mailto:ardiyantomansur@gmail.com">ardiyantomansur@gmail.com</a>                  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik                  Universitas Jember</p>	<p><b>PENGUATAN KREDIBILITAS DAN KOMUNIKASI POLITIK CALEG PEREMPUAN</b>                  (Gagasan bagi Caleg Perempuan Menjelang Pemilu 2019)</p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Berbagai upaya kebijakan politik di parlemen untuk perempuan telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2004, dengan memberikan peluang yang cukup besar untuk meningkatkan keterwakilan politik di parlemen. Namun realitanya ada partai-partai politik yang belum memperhatikan kebijakan quota 30 % keterwakilan perempuan. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan quota keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislative belum dijalankan sepenuhnya. Lemahnya peraturan untuk mengikat partai menjamin keterwakilan perempuan di dalam internal kepengurusan partai</p>

	<p>berdampak pada rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen. Apalagi diperparah oleh kendala kultural, structural dan juga personal yang dialami oleh caleg perempuan. Di era teknologi informasi caleg perempuan harus mempunyai kemampuan komunikasi politik dalam mencapai tujuan. Kajian ini memberikan pencerahan gagasan untuk caleg perempuan menjelang Pemilu 2019. Penguatan kredibilitas dan komunikasi politik caleg perempuan diharapkan bisa meningkatkan jumlah dan kualitas keterwakilan politik di parlemen. Teori komunikasi politik yang merupakan penyampaian pesan politik dari pengirim ke penerima dengan penekanan tujuan khusus yang dibutuhkan pemilih. Dalam proses komunikasi politik juga diperlukan sebuah pemahaman tentang perilaku sosio politik dari khalayak agar pesan politik dapat mencapai tujuan. Tulisan ini juga didukung oleh data-data sekunder keterwakilan perempuan terpilih di parlemen tahun 2004, 2009 dan 2014, serta kajian pustaka yang cukup membantu menganalisis focus tulisan ini. Upaya yang harus dilakukan oleh caleg perempuan menjelang PEMILU 2019 diantaranya: 1) meningkatkan kredibilitas dirinya sebagai caleg perempuan; 2) meningkatkan komunikasi politik; 3) memahami perilaku sosio politik dari khalayak.</p> <p><b>Kata kunci: Caleg Perempuan, Komunitasi Politik, Kredibilitas.</b></p>
<p><b>M. AFIFULLOH</b> <i>FISIP Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>KONSTRUKSI LAKI-LAKI PADA TUBUH PEREMPUAN TOKOH UTAMA NOVEL PADANG BULAN</b></p>

	<p style="text-align: center;"><b>KARYA ANDREA HIRATA</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Padang Bulan merupakan novel karya Andrea Hirata yang bercerita tentang kegigihan seorang perempuan dalam memperjuangkan kehidupan diri dan keluarganya. Penelitian ini mencoba untuk mengkonstruksi peran tokoh utama dalam novel tersebut lewat pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kepribadian rekaan dalam karya sastra. Metode penelitian ini adalah deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data dengan Teknik baca catat. Data primer adalah novel Padang Bulan karya Andrea Hirata, data sekundernya adalah kriteria. Kriteria tersebut berupa peneliti sendiri, buku referensi, jurnal, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh utama yang bernama Enong merupakan wujud perempuan yang disamakan karena karakternya lebih kuat sebagai seorang lelaki dalam peranan kehidupan. Enong menjadi tulang punggung keluarga, menjadi seorang kakak bagi adik-adiknya sekaligus menjadi ‘bapak’ bagi keluarganya. Enong menjadi pekerja kasar sebagai penambang timah. Enong merupakan perempuan yang gigih yang mengandalkan ototnya sama seperti lelaki meskipun ia sebenarnya adalah perempuan yang pintar.</p> <p><b>Kata Kunci: Psikologi Sastra, Padang Bulan, Perempuan, Andrea Hirata.</b></p>
<p><b>Irwan</b> <i>Universitas Sebelas Maret</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>RELASI KUASA DAN MODAL (Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nangka Terhadap Pembukaan</b></p>

	<p style="text-align: center;"><b>Perkebunan Kelapa Sawit PT. (Gemilang Cahaya Mentari)</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat relasi yang dilakukan oleh pihak penguasa dan pengusaha terkait pembukaan perkebunan kelapa sawit, telah membuat masyarakat diabaikan dalam memberikan partisipasinya, ditambah dengan pembuatan kebijakan atas dasar kepentingan materialistis, akhirnya membuat masyarakat berupaya untuk melakukan perlawanan dan membentuk forum untuk menghilangkan kebijakan yang tidak memihak tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dianalisis melalui teknik analisis kritis menggunakan teori kritis Herbert Marcuse mengenai konsep relasi, kekuasaan dan kesadaran individu. Akhirnya praktik itu dapat dianalisis dan dipandang sebagai sebuah kajian ilmiah dalam bidang akademis.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan, hubungan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha lebih didasarkan pada logika instrumental dengan adanya praktik relasi yang tidak seimbang dalam penentuan kebijakan dan wacana pembukaan perkebunan kelapa sawit. Praktik itu terwujud dalam hasil keputusan yang merugikan masyarakat dengan adanya negosiasi dan manipulasi terstruktur, yang akhirnya hanya menguntungkan pihak aparat desa dan bawahannya. Keadaan itu dilakukan oleh aparat desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki wewenang dalam membuat keputusan. Ternyata kekuasaan yang dimilikinya</p>
--	--

	<p>telah menerapkan kekuasaan yang otoriter dalam upaya untuk memperkaya dirinya sendiri dan golongannya. Terlebih lagi tanpa adanya partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam mengambil kebijakan itu, akhirnya membuat masyarakat berupaya untuk melawan bentuk kekuasaan tersebut. Perlawanan dilakukan tidak lain adalah untuk membongkar dominasi dan pola kuasa yang dijalankan aparatur desa dengan cara melakukan penyatuan melalui pembentukan forum peduli lingkungan Desa Nangka, sebagai wadah untuk membongkar praktik kuasa dan tempat masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya secara legal.</p> <p><b>Kata kunci: Relasi, Kuasa, Modal dan Perlawanan</b></p>
<p><b>DARWANCE</b> <i>Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI POTENSI DAYA TARIK WISATA MELALUI KEBIJAKAN DI BIDANG LEGISLASI</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Pasca tambang, pariwisata merupakan salah satu bidang yang kini dikembangkan oleh hampir seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya pariwisata, dan mengintegrasikan segala bentuk aspek di</p>

	<p>luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya budaya dengan nilai-nilai kerarifan lokal di dalamnya. Sebagai kekayaan budaya tak benda, kearifan lokal dalam sebuah budaya memang berpotensi menghilang. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam sebuah budaya, turut menghilang dengan menghilangnya budaya itu sendiri. Kearifan lokal dengan demikian memerlukan upaya pelestarian agar eksistensi kearifan lokal tetap terjaga dari sepanjang waktu. Hukum sebagai salah satu sarana kontrol sosial berada posisi yang bisa memainkan peran strategis dalam bentuk kebijakan di bidang legislasi.</p> <p><b>Kata Kunci: Kearifan Lokal, Daya Tarik Wisata, Kebijakan Legislasi</b></p>
<p><b>Perawati Sinti</b>  <i>Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan</i>  <i>e-mail: perawatisinti@gmail.com</i></p>	<p><b>DEKONSTRUKSI BUDAYA TERHADAP PEREMPUAN DALAM AKSES PENDIDIKAN</b></p> <p><b>ABSTRAK</b>  Pendidikan sebagai suatu usaha sadar mendewasakan manusia seyogyanya menjadi dasar untuk setiap pemikiran tertentu. Dewasa ini pendidikan memiliki makna dan fungsi yang sangat penting</p>

	<p>karena melalui pendidikan manusia mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki untuk memperoleh hasil tertentu bagi dirinya dan orang lain. Namun pada kenyataannya, akses terhadap pendidikan tidaklah mudah khususnya bagi perempuan di desa. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender masih sangat terasa di dalam masyarakat. Padahal keadilan tersebut telah diwujudkan antara lain melalui UU No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women-CEDAW), kemudian diperkuat dengan keberadaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kuatnya adat istiadat berbalut budaya patriarki telah menghambat perempuan dalam mengenyam pendidikan tinggi. Laki-laki lebih mudah mendapatkan akses pendidikan karena mereka kelak akan mencari nafkah sehingga dibutuhkan skill yang mumpuni. Sementara perempuan dianggap sebagai insan nomor dua setelah laki-laki. Banyak orang tua yang tidak ingin menyekolahkan anak perempuan mereka karena pada akhirnya akan kembali ke dapur (domestik). Anak perempuan juga sering dinikahkan muda dengan alasan hal tersebut dapat menjamin masa depannya lebih baik. Maka semakin sulitlah perempuan keluar dari nilai dan norma yang telah mendarah daging hingga pada akhirnya anak perempuan menerimanya sebagai konsekuensi budaya yang harus dijalani. Menurut konsep Dekonstruksi Derrida, terdapat pemikiran lain yang dapat</p>
--	--



	<p>menjadi pemikiran alternatif disamping pemikiran yang telah ada. Derrida mengemukakan agar dekonstruksi dilihat sebagai sebuah keterbukaan terhadap adanya (the other) dan menolak bentuk suatu pengetahuan absolut. Dekonstruksi dilakukan untuk membongkar nilai-nilai dalam masyarakat. Ketidakadilan gender yang berlangsung akan menghambat perkembangan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut disebabkan karena perempuan mempunyai peranan strategis dalam mencetak generasi berkualitas serta mengembangkan ekonomi melalui potensi yang dimilikinya. Pendekatan dilakukan secara deskriptif dengan sumber kajian pustaka berbagai literatur yang terbaru dan relevan. Diharapkan melalui dekonstruksi budaya pada tataran nilai sosial yang ada dalam masyarakat pada gilirannya akan memberikan perubahan pola hubungan sosial yang lebih adil gender.</p> <p><b>Kata Kunci: Dekonstruksi Budaya, Pendidikan Perempuan, Keadilan Gender.</b></p>
<p><b>Novendra Hidayat</b>  <i>Ilmu Politik, FISIP UBB</i>          novendra.hidayat@yahoo.co.id</p>	<p><b>MINANGKABAU DAN POLITIK ELEKTORAL</b>  <b>(Studi Pemanfaatan Identitas Minangkabau Pada Pemiluakada Bangka Belitung 2017)</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Studi ini berupa kajian analisis mengenai pemanfaatan identitas etnis Minangkabau pada kontestasi politik elektoral. Pengalaman pada Pemiluakada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017,</p>

	<p>mengindikasikan adanya kecenderungan bermainnya isu identitas di sebahagian kecil masyarakat Minangkabau untuk memenangkan kandidatnya. Penelitian ini berupaya mengkaji sikap dan perilaku politik masyarakat khususnya tim sukses yang melibatkan diri dalam kegiatan pemenangan kandidat yang berkompetisi pada Pilkada Bangka Belitung 2017. Berkaitan dengan pembentukan identitas terdapat tiga perspektif yaitu primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada pendekatan <b>instrumentalisme</b>, yaitu menerangkan bahwa identitas etnis (etnisitas) dijadikan sebagai akomodasi kepentingan elit politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik dalam penentuan informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan menggunakan pendekatan purposive sampling sesuai dengan kebutuhan. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Model analisis yang digunakan dalam menginterpretasikan data-data hasil penelitian menggunakan analisis model interaktif yang dibangun oleh Miles dan Haberman (1992).</p> <p><b>Kata Kunci : Minangkabau, Identitas, dan Politik Elektoral</b></p>
<p><b>Rio Yusri Maulana</b>  <i>Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi</i>  <i>rioyusrimaulana@gmail.com</i></p>	<p><b>PENGAWASAN POLITIK DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DI ERA REFORMASI</b></p>

	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Penelitian ini di dasarkan atas permasalahan yang terjadi yaitu terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan adalah lemahnya pengawasan DPRD di dalam pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan maksud mencari tahu penyebab terjadinya penyimpangan penyelenggara pemerintahan daerah dan model pengawasan yang digunakan oleh DPRD dalam proses pengawasan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Media dan LSM yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.</p> <p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa DPRD telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsinya, namun pelaksanaan pengawasan tersebut hanya dalam tataran normatif dan formalitas semata, tanpa adanya penggunaan model pengawasan yang tepat, sehingga pengawasan DPRD tidak berjalan dengan baik serta berdampak pada penyimpangan dalam pelaksanaan APBD. Pada akhirnya temuan dalam penelitian diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan bidang kajian ilmu pemerintahan yaitu tentang konsep pengawasan legislatif DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pola hubungan yang harmonis dan seimbang juga harus</p>
--	---

	<p>didukung oleh sebuah model pengawasan yang tepat, serta memiliki aturan baku yang dapat menjadi pedoman pengawasan oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya.</p> <p><b>Kata kunci : Pengawasan, Pengawasan Legislatif, Pemerintah Daerah.</b></p>
<p><b>Riska Novalia</b> <i>Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEKERASAN SIMBOLIK TERHADAP PELUANG KERJA TUNA DAKSA DALAM INSTANSI DI SUNGAILIAT</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Kekerasan simbolik umumnya dialami oleh kelompok minoritas di lingkungan masyarakat seperti penyandang tuna daksa. Kekerasan simbolik terhadap tuna daksa merupakan suatu kekerasan non fisik menggunakan simbol, bahasa, atau istilah tertentu yang berdampak pada psikologis tuna daksa. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk mengetahui pandangan masyarakat dan stakeholders terhadap tuna daksa yang bekerja. Kedua, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang didapatkan oleh penyandang tuna daksa. Penelitian ini menggunakan Teori Kekerasan Simbolik dari Pierre Felix Bourdieu. Teori ini memusatkan kekerasan simbolik terjadi tidak dalambentuk kekerasan fisik melainkan dalam bentuk pemaksaan kesewenangan budaya dengan menggunakan bahasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tak terstruktur dan dokumentasi. Jumlah informan yang terdapat dalam penelitian berjumlah 25</p>

	<p>orang terdiri atas tuna daksa, masyarakat, dan stakeholders. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pandangan masyarakat dan stakeholders terhadap tuna daksa yaitu pandangan positif dan pandangan negatif. Pandangan positif masyarakat dan stakeholders berupa dukungan moril dan apresiasi terhadap tuna daksa yang ingin bekerja sedangkan pandangan negative berupa anggapan tuna daksa merupakan orang yang sakit, tidak produktif, dan lemah. Adapun bentuk-bentuk kekerasan simbolik antara lain, pelabelan negatif tuna daksa, krisis kepercayaan masyarakat dan stakeholders, serta persyaratan perekrutan pegawai yang tidak pro terhadap tuna daksa.</p> <p><b>Kata Kunci: Tuna Daksa, Stakeholders, Kekerasan Simbolik.</b></p>
<p><b>Rendy Hamzah</b>  <i>Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung</i>  <i>rendy@ubb.ac.id</i></p>	<p><b>DARI KEPOG KE KAMPUNG          (Adat &amp; Demografi Politik Keseharian Warga Pekebun Lada di Pengkalan Batu- Ranggung Bangka Selatan)</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Politik demografi berbasis adat dan politik keseharian warga pekebun lada menjadi fenomena menarik untuk melihat bagaimana struktur dan model politik kewargaan yang dipraktekkan oleh warga atau komunitas pekebun lada di Ranggung-Bangka Selatan. Studi ini focus pada bahasa mengenai bagaimana sebetulnya realitas politik kewargaan &amp; politik demografi yang berlangsung pada ‘kepog dan kampung’ tradisional pekebun lada. Kemudian, juga dibahas tentang bagaimana metamorfosa kehidupan ‘urang kepog’ dan kampung</p>

	<p>yang merupakan entitas yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan mengambil pendekatan kajian politik demografi, studi ini menyimpulkan bahwa praktek kehidupan sosial-politik sehari-hari warga sangat kuat dengan semangat solidaritas, kearifan lokal, serta model kehidupan sosial yang begitu sederhana, terbuka, dan kental dengan nilai-nilai tradisi adat budaya lokal Selain itu, cara warga dalam merespon konteks kesejahteraan juga sangat menarik. Ada konteks berbeda bagi sebagian publik kebanyakan ketika membaca realitas demografi warga 'kampung'. Meski demikian, politik tertib sosial dan politik warga pekebun lada selalu dibarengi dengan semangat untuk menjaga semangat komunalitas serta memastikan keberlanjutan aspek ekologi dan ekosistem yang sangat berarti bagi kehidupan mereka dalam jangka panjang.</p> <p><b>Kata kunci: Kepog-Kampung, Adat, Demografi Politik, Kewargaan, Pekebun Lada, Ranggung- Bangka Selatan.</b></p>
<p><b>Yusa Djuyandi</b>  <i>Dosen Program Studi Ilmu Politik,  Universitas Padjadjaran, Indonesia.  Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id</i></p>	<p><b>SINERGITAS SATUAN KOMANDO  WILAYAH TNI AD DAN  PEMERINTAH KABUPATEN  SUKABUMI DALAM  MENUMBUHKAN SEMANGAT  BELA NEGARA</b></p> <p><b>ABSTRAK</b>  Saat ini ancaman terhadap negara tidak hanya dapat dilihat dari ancaman militer, tetapi juga dapat dilihat dari ancaman non-militer. Ancaman non-militer, seperti ancaman dengan dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dapat melemahkan semangat nasionalisme. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka</p>

	<p>pemerintah kemudian menyelenggarakan program bela negara. Sinergitas antara Satkowil TNI AD dan Pemda Kabupaten Sukabumi dalam program bela negara dianggap penting, hal ini juga karena mempertimbangkan aspek geopolitik dan geostrategis Indonesia dari wilayah Kabupaten Sukabumi. Dalam implementasinya, program bela negara yang dilakukan keduanya dianggap memberikan manfaat oleh masyarakat. Respon positif muncul karena adanya sinergitas antara Satkowil TNI AD, yaitu Komando Distrik Militer Kabupaten Sukabumi, dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Sinergitas antara keduanya tercapai karena adanya kesetiaan pada partner, upaya untuk menjaga saling ketergantungan, penyesuaian diri dengan partner (<i>cultural fit</i>), integritas dan intensitas hubungan, dan adanya institusionalisasi.</p> <p><b>Kata Kunci: Ancaman, Bela Negara, Sinergitas, Sukabumi, Satkowil.</b></p>
<p><b>Dwi Haryadi</b>  <i>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>MENJAGA LINGKUNGAN BANGKA BELITUNG MELALUI PENEGAKAN HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL</b></p> <p><b>ABSTRAK</b>  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil komoditas timah sudah dieksploitasi sejak tahun 1700-an sampai dengan saat ini. Bahkan areal penambangannya kini tidak hanya di daratan saja namun juga meliputi wilayah laut. Akibat dari penambangan timah tersebut kerusakan lingkungan tidak terhindarkan. Aktivitas tambang legal yang belum optimal dalam melakukan tanggungjawab reklamasi, ditambah dengan maraknya tambang ilegal semakin memperburuk kondisi</p>

	<p>lingkungan hidup di Bangka Belitung. Konsep pembangunan berkelanjutan seolah gagal dalam tata kelola pertimahan dan lingkungan hidup selalu menjadi korban. Melalui penegakan hukum lingkungan yang tegas dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dimasyarakat Bangka Belitung diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p><b>Kata Kunci: lingkungan, penegakan hukum, kearifan lokal</b></p>
<p><b>Ranto</b>  <i>Universitas Bangka Belitung</i>  <i>bangranto@yahoo.com;</i>  <i>rantopalempat@gmail.com</i></p>	<p><b>PETAKA POLITIK TIMAH DI BABEL: Kebijakan Tak Sensitif Nelayan (Pengalaman Nelayan di Bangka Barat)</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak langsung aktifitas tambang timah di laut terhadap kehidupan nelayan di Bangka Barat. Lebih lanjut, penelitian ini juga mendeteksi posisi mereka dalam aktifitas. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan survei dan interview dalam pengumpulan datanya. Responden dipilih dengan metode purposive sampling yang merepresentasikan Nelayan masyarakat Bangka Barat. Analisis statistic dilakukan dengan test statistik deskriptif. Hasil perhitungan dipresentasikan menggunakan presentase. Secara umum, penelitian ini menghasilkan dua informasi yaitu pertama mayoritas nelayan Bangka Barat menolak aktifitas pertambangan timah laut. Kedua,</p>



	<p>kehidupan nelayan relative lambat dan lemah sejak tambang timah laut dijalankan. Hal tersebut mengindikasikan penurunan hasil tangkapan ikan mempengaruhi pendapatan mereka dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.</p> <p><b>Kata Kunci: Kebijakan, Tambang Timah, Nelayan.</b></p>
<p><b>Rezi Prayoga</b> <i>Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>PEMEKARAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAPA KEHIDUPAN SOSIO-KULTURAL MASYARAKAT (Studi Pada Masyarakat ‘Kundi Bersatu’ Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat)</b></p> <p><b>ABSTRAK</b> Pemekaran desa merupakan salah satu rangkaian dari proses otonomi daerah untuk menciptakan beberapa wilayah menjadi beberapa bagian sehingga proses pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Implementasi dari pemekaran desa membuat terjadinya pemisahan kehidupan masyarakat menjadi tiga wilayah administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat. Teori yang digunakan untuk menganalisis pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat, yaitu teori modal sosial James Coleman mengenai struktur</p>

	<p>relasi dan jaringan. Modal sosial merupakan sebuah relasi dan jaringan untuk mengikat hubungan-hubungan individu dalam suatu komunitas masyarakat. Dengan kata lain struktur relasi dan jaringan inilah yang memfasilitasi aktor atau orang dapat saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan tertentu. Adapun Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi terlibat, wawancara tak terstruktur, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemekaran desa yang terjadi pada masyarakat ‘Kundi Bersatu’ tidak menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat. Ini terlihat dari kondisi kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah pemekaran desa, dimana kondisi sosial masyarakat cenderung tidak mengalami perubahan, sehingga kehidupan masyarakat masih bersatu. Hal ini terlihat dari masih kuatnya solidaritas sosial masyarakat dan masih terjaganya adat istiadat setelah terjadinya pemekaran desa. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi implikasi pemekaran desa dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat terdiri dari faktor internal yang meliputi faktor adat istiadat, agama, dan ikatan kekerabatan. Faktor eksternal yang meliputi faktor geografis dan sumber daya alam sebagai aset bersama.</p> <p><b>Kata Kunci: ‘Kundi Bersatu’, Pemekaran Desa, dan Implikasi.</b></p>
<p><b>Uzia Marti</b> <i>Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>DEESKALASI KONFLIK ANTAR DESA (STUDI TERHADAP MODAL</b></p>

**SOSIAL SEBAGAI KATUP  
PENYELAMAT KONFLIK DI  
KECAMATAN AIR GEGAS**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konflik antar Desa di Kecamatan Air gegas yang melibatkan Desa Air Bara dan untuk mengetahui proses deeskalasi dari konflik-tersebut serta bagaimana pendayagunaan modal sosial sebagai katup penyelamat konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Teori yang digunakan adalah teori modal sosial dari Robert Putnam dalam teorinya Putnam mengatakan bahwa modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial (jaringan, norma dan kepercayaan) yang mendorong partisipan untuk bertindak bersama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Air Bara usia diatas 20 tahun serta mengetahui dinamika dan proses deeskalasi konflik melalui pendayagunaan modal sosial sebagai katup penyelamat konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan modal sosial Robert Putnam efektif untuk meminimalisir atau menjadi katup penyelamat konflik antar desa di kecamatan Air Gegas. Pendayagunaan modal sosial jaringan yaitu jaringan

	<p>antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa serta jaringan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan jaringan antara pemerintah Desa Air Bara dengan pemerintah Desa Ranggalas. Hasil dari pendayagunaan jaringan terciptanya regulasi larangan hiburan malam, razia minuman keras, pembentukan organisasi kepemudaan dan adanya kesepakatan tentang pembukaan lahan tampang sebagai lahan TI. Pendayagunaan modal sosial berupa norma yaitu melalui penguatan norma agama dan norma hukum yang berimplikasi pada norma lainnya yaitu norma kesopanan dan norma kesusilaan. Pendayagunaan modal sosial kepercayaan (trust) yaitu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Air Bara. Berdasarkan tingkatannya kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah Desa Air Bara yaitu tingkatan individual, tingkatan relasi sosial dan pada tingkatan sistem sosial. Kepercayaan tersebut terbangun melalui dukungan pemerintah Desa Air Bara baik moral maupun material terhadap kegiatan positif masyarakat, memperbaiki serta mengadakan sarana-prasarana baik olahraga, kesehatan, keagamaan serta ruang publik.</p> <p><b>Kata Kunci: Konflik, Deeskalasi, dan Modal Sosial</b></p>
<p><b>Ririn Anisa</b> <i>Universitas Bangka Belitung</i></p>	<p><b>ADABTASI SOSIAL PEREMPUAN MUDA PASCA BERCERAI DI KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH</b></p> <p><b>ABSTRAK</b> Pernikahan merupakan proses terbentuknya salah satu lembaga unit terkecil di dalam masyarakat, yaitu keluarga. Pada saat ini nilai-nilai yang</p>

	<p>terkandung di dalam pernikahan mengalami pergeseran sehingga meningkatkan angka perceraian pada pasangan usia muda. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab perceraian, mendeskripsikan dampak perceraian bagi perempuan muda dan menganalisis pola adaptasi yang dilakukan oleh perempuan muda pasca bercerai.</p> <p>Teori yang digunakan untuk menganalisis pola adaptasi yang dilakukan oleh perempuan muda pasca bercerai di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah adalah teori pilihan rasional James Coleman yang memusatkan perhatian terhadap aktor yang mempunyai tujuan. Adapun jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi non-participant, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan yaitu 26 orang.</p> <p>Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan mayoritas faktor penyebab perceraian adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (50%, sedangkan faktor lain disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor ketidakcocokan, dan faktor perselingkuhan. Sedangkan dampak perceraian dapat dibagi menjadi 2 yaitu dampak negatif dan dampak positif. Sebagian besar dampak negatif perceraian adalah menyebabkan trauma bagi perempuan (47%), sedangkan dampak lainnya adalah menambah beban</p>
--	---

	<p>orang tua, perempuan mengemban peran ganda, menurunnya ekonomi keluarga dan terjadinya gangguan psikologis pada anak. Sedangkan mayoritas dampak positif perceraian adalah terlepas dari tindak kekerasan (54%) dan bebas mengaktualisasikan diri. Untuk itu perempuan harus menyesuaikan diri terhadap perbedaan kondisi tersebut dengan cara beradaptasi. Adaptasi tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga aspek, yaitu adaptasi psikologis, adaptasi sosial, dan adaptasi ekonomi. Adaptasi yang dilakukan perempuan muda merupakan sebagai wujud rasionalitas perempuan.</p> <p><b>Kata kunci: Pernikahan, Perceraian, Perempuan Muda, dan Pilihan Rasional.</b></p>
<p><b>Henry Sitorus</b>  <i>Sekretaris Prodi S2 Sosiologi FISIP USU</i></p> <p><b>Marlon Sihombing</b>  <i>Gurubesar, Ketua Prodi Administrasi Bisnis FISIP USU</i></p>	<p><b>MODEL PARTISIPASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT ADAT UNTUK RESOLUSI KONFLIK PERUSAHAAN TAMBANG DI PROPINSI SUMATERA UTARA</b></p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>The existention of three mining companies held on North Sumatra Province, there are Martabe Agincourt Resources Ltd at Batangtoru District of South Tapanuli Regency, Sorikmas Mining Ltd at Nagajuang District of Mandailing Natal Regency, and Dairi Prima Mineral Ltd at Silimapungga-pungga District of Dairi Regency have positive and negative impacts to traditional communities. In the other hand it could generate social problem such as social polarization, escalation tension of social conflict, social</p>

	<p>prejudice, and the diffusion between societal groups regarding to the land compensation. These research is aim to tracking the map of social conflict that due to operation of mining companies that parallel with traditional societies positioning. Then to classify conflict resources, to describe the dynamic of community institution, as well as to design the participation yield models of traditional community that cooperation with mining company. In the end, these research will trying to integrate the strengthening social culture aspects of traditional society with community empowerment models as the strategic of social conflict resolution scheme between traditional society and the mining companies in North Sumatra Province.</p> <p><b>Key word: social conflict resolution, traditional society, the impact of mining companies</b></p>
--	--

MENJAGA LINGKUNGAN BANGKA BELITUNG  
MELALUI PENEGAKAN HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL<sup>1</sup>

Oleh : Dr. Dwi Haryadi, SH., MH.<sup>2</sup>

*Abstrak*

*Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil komoditas timah sudah dieksploitasi sejak tahun 1700-an sampai dengan saat ini. Bahkan areal penambangannya kini tidak hanya di daratan saja namun juga meliputi wilayah laut. Akibat dari penambangan timah tersebut kerusakan lingkungan tidak terhindarkan. Aktivitas tambang legal yang belum optimal dalam melakukan tanggungjawab reklamasi, ditambah dengan maraknya tambang ilegal semakin memperburuk kondisi lingkungan hidup di Bangka Belitung. Konsep pembangunan berkelanjutan seolah gagal dalam tata kelola pertambangan dan lingkungan hidup selalu menjadi korban. Melalui penegakan hukum lingkungan yang tegas dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dimasyarakat Bangka Belitung diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan.*

*Kata Kunci: lingkungan, penegakan hukum, kearifan lokal*

A. Lingkungan Selalu Jadi Korban

Aspek perlindungan lingkungan di Indonesia sebenarnya sudah mendapat jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahkan Jimmly Asshiddiqie menyebutkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). Beliau menawarkan gagasan tentang pentingnya konstitusi hijau, kedaulatan lingkungan dan bahkan konsepsi demokrasi model baru yang diistilahkan sebagai ekokrasi (*ecocracy*)<sup>3</sup>. Konsep ekokrasi dapat dilihat sebagai tahapan paling baru dalam perkembangan filsafat hukum dan politik mengenai kekuasaan negara. Kita dituntut untuk meletakkan dasar-dasar konseptual mengenai isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang tertera dalam konsep demokrasi, teokrasi,

---

<sup>1</sup> Paper disampaikan dalam Konferensi Nasional “Kearifan Lokal : Nilai , Praktik, dan Tantangan Perubahan” dengan Sub tema : Tata Kelola SDA dan Kebijakan Lingkungan, diselenggarakan oleh FISIP Universitas Bangka Belitung pada 19-20 September 2017, Hotel Soll Marina, Pangkalpinang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

<sup>3</sup> Jimmly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 5



nomokrasi<sup>4</sup>. Artinya, pembangunan berwawasan lingkungan seharusnya menjadi *centerpoint* dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam eksploitasi tambang timah di Bangka Belitung.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, seharusnya menjadi kombinasi yang ideal. Namun dalam praktiknya lingkungan selalu menjadi korban dan dinomorduakan. Alasan klasik ekonomi atau bahasa kesehariannya biasa disebut “urusan perut” telah mengabaikan sendi-sendi lingkungan hidup yang sebenarnya menjadi tumpuan hidup umat manusia. Jika berani jujur, sebenarnya dibalik pembenaran urusan perut tadi, ada eksploitasi timah besar-besaran yang merusak lingkungan dan menguntungkan jaringan bisnis timah ditingkat lokal, nasional, regional bahkan internasional. Penambang dan masyarakat lokal yang menikmati sedikit saja hasil timahnya untuk bertahan hidup, secara jangka panjang harus menikmati dampak kerusakan lingkungan berkepanjangan.

Berikut beberapa data kerusakan lingkungan yang menunjukkan betapa lingkungan selalu dikorbankan atas nama kepentingan ekonomi melalui eksploitasi tambang timah. Berdasarkan laporan *review* lahan kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013, kriteria agak kritis mencapai 987.739 Ha atau 3 (tiga) kali lipat dari tahun 2010. Kriteria kritis juga meningkat dari 88.386 Ha ditahun 2010 menjadi 155.389 Ha. Begitupula dengan kriteria sangat kritis dari 27.782 Ha, sekarang sudah mencapai 60.720 Ha. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh perubahan penutupan lahan, seperti pertambangan dan pembukaan lahan<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 7-8

<sup>5</sup>*Laporan Review Lahan Kritis Prov. Kep. Babel Tahun 2013*, BPDAS Baturusa Cerucuk, Kemenhut.

Aktivitas tambang timah tidak hanya merusak hutan tetapi juga merambah sungai-sungai di Bangka Belitung. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Babel, daerah aliran sungai (DAS) Bangka Belitung hampir 90 persen sudah rusak parah. Kualitas airnya memprihatinkan karena limbah dari aktivitas pertambangan. Di Bangka terdapat sekitar 12 (dua belas) DAS, sedangkan di Belitung ada 8 (delapan) dengan ukuran besar dan menengah<sup>6</sup>.

Selanjutnya, bencana banjir besar pada Februari 2016 yang merendam Kota Pangkalpinang dan beberapa titik di Kabupaten di Pulau Bangka dan menyebabkan akses transportasi terputus serta beberapa jembatan putus juga ditengarai sebagai akibat aktivitas tambang yang merusak lingkungan. Terakhir banjir yang melanda Pulau Belitung pada Juli 2017 juga diduga akibat dari pertambangan yang tidak terkontrol dengan baik.

Dalam perspektif viktimologi, lingkungan juga merupakan *korban* sebagaimana objek korban yang lain, seperti hanya manusia atau hewan. Menurut Abdussalam<sup>7</sup>, korban meliputi perseorangan, institusi, ***lingkungan hidup***, masyarakat, bangsa, dan negara. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Pandangan ini penting mengingat selama ini kita selalu

---

<sup>6</sup>Pos Belitung edisi 11 Februari 2014

<sup>7</sup> Abdussalam. 2010. *Victimology*, Jakarta: PTIK. Hlm. 6-7. Baca juga Yeni Widowaty, 2011. *Viktimologi (Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*. Semarang, BP Undip

merasa superior dan mengorbankan lingkungan untuk kepentingan manusia adalah hal yang biasa.

Lingkungan sebagai korban penting untuk kita pahami bersama, agar kesadaran akan pelestarian lingkungan dan memposisikannya selayaknya makhluk hidup dapat menumbuhkan kesadaran kolektif betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup.

## **B. Penegakan Hukum Lingkungan**

Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah melalui instrumen penegakan hukum, baik dalam fungsinya sebagai unsur preventif/pencegah maupun sebagai upaya represif. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat Bab khusus tentang ketentuan pidana yang memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana terkait lingkungan hidup mulai Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Rumusan ketentuan pidana menggunakan kata “Setiap Orang” yang berarti bahwa subjek tindak pidana kerusakan lingkungan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Perusakan lingkungan hidup dalam undang-undang ini disebutkan sebagai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sementara Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan khusus untuk pelaku korporasi tentu sanksinya berbeda, baik jenis maupun lamanya pidana. Saat ini korporasi sangat potensial untuk melakukan kejahatan lingkungan. Berikut beberapa regulasi tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan, yaitu:

**Pasal 116**

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 11**

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

**Pasal 118**

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus

yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

#### **Pasal 119**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

Penegakan hukum lingkungan menjadi tuntutan utama di Bangka Belitung ketika kerusakan lingkungan sudah begitu masif. Namun faktanya penegakan hukum lingkungan dengan berbagai tindak pidana yang sudah dijabarkan di atas belum mendapat perhatian khusus. Padahal kerusakan lingkungan begitu nyata didepan mata. Dalam berbagai kasus tambang ilegal yang sampai ke meja hijau, dominan penegak hukum hanya sebatas menggunakan undang-undang Mineral dan Batu Bara. Sementara kejahatan lingkungan yang juga dilakukan tidak digunakan. Belum ada komitmen politik hukum lingkungan yang memadai ditengah-tengah kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Lingkungan belum dipandang sebagai korban sehingga dapat diabaikan keberadaannya, termasuk lemahnya penegakan hukum lingkungan

#### ***C. Menjaga Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal***

Bangka Belitung dengan slogan provinsi “serumpun sebalai” jelas bercirikan melayu yang memegang teguh banyak nilai-nilai kearifan lokal. Menurut ketentuan umum Undnag-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang

berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Terkait kearifan lokal guna menjaga lingkungan hidup, masyarakat Bangka Belitung di beberapa daerahnya memiliki kearifan lokal guna menjaga lingkungan dan mencegah penambangan liar yang merusak lingkungan.

Salah satu kearifan lokal yang dapat menjadi sarana pelestarian lingkungan dan menjaga hutan akibat pertambangan timah yang merusak adalah pantangan “Behurak/Ngerik” di hutan. Behurak mempunyai pengertian bersorak. Hal ini dilarang dilakukan jika kita sedang berada di hutan karena akan dijawab oleh hantu yang memiliki suara mirip dengan yang bersorak. Di samping itu juga larangan ini bertujuan untuk tidak mengganggu ketenangan para hantu yang bersemayam. Kemudian ada pantangan “hemangge”, yakni menghindari perilaku tidak sopan dan mengatakan “*Numpang Lalu / permisi lewat*” ketika berjalan di hutan karena diyakini berpenunggu<sup>8</sup>. Melihat kondisi kekinian, sebenarnya behurak tadi mewajibkan kita untuk tidak sembarangan dalam mengelola sumberdaya alam, seperti hutan, sungai dan lain-lain, termasuk dalam eksploitasi timah yang tidak berlebihan dan merusak lingkungan.

*Nabat* di Tengah hutan-kelekek memiliki fungsi dan manfaat sangat besar sebagai etika yang berfungsi bagi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, khususnya akan keberadaan hutan<sup>9</sup>. Terlebih ditengah gencarnya investasi

---

<sup>8</sup> Rendy Hamzah, 2010. *Bangka Selatan dalam Narasi Awal Kebangkitan*. Bangka. INTIKLAD. Hlm. 65-66

<sup>9</sup> Di Bangka terdapat pula istilah Kelekek “*Kelak Kek Ikak*”, yang memiliki arti wujud kebaikan bagi anak cucu mereka disamping diniatkan agar mampu bertahan hidup, secara praktis kelekek adalah perkebunan yang isinya berbagai tanaman dan buah-buahan. Jadi budaya berkebun dan upaya keberlanjutan sebenarnya merupakan kearifan lokal yang sudah turun menurun di Bangka dan menjadi instrumen pencegah perusakan hutan/kelekek/lingkungan. Dalam Rusydi

perkebunan serta pertambangan secara tak terkendali akhir-akhir ini. Nabat mengandung nilai tentang eksploitasi sumber daya alam yang tidak berlebihan dan jangan sampai mengganggu fungsi alam itu sendiri.

*Tulah dek nabat* disematkan kepada pejabat pemerintahan maupun pemimpin serta pengelola adat yang telah diberi kepercayaan, namun mereka justru curang, culas, korup, sombong, tidak jujur dan jauh dari rakyatnya. Terkait kearifan lokal ini, tentunya para pejabat pemerintah, penegak hukum dan pengusaha timah untuk punya komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan.

*Nabet beriken* sikap yang dihindari karena akan menjadi dek betuah dalam kehidupannya, yaitu orang yang tidak peduli, individualistis, mengutamakan kelompoknya saja.<sup>10</sup> Kearifan lokal ini memberikan warning kepada kita semua bahwa lingkungan tidak bisa dikorbankan hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat. Sikap individualistik berorientasi pada kepentingan ekonomi telah menggerus kepedulian kita kepada lingkungan dimana kita hidup.

Disamping beberapa kearifan lokal di atas, dikenal pula timah ampak, yaitu suatu kearifan lokal demi untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara timah yang ada sudah dihampakan, dalam arti kualitas dan kuantitas timahnya sudah tidak baik lagi, atau dalam istilah masyarakat desa setempat disebut dengan diasal. Beberapa media yang digunakan untuk timah ampak ini seperti, tumbuhan kumbe', koin atau uang logam, kayu, tidak menambang hanya menggunakan celana dalam dan memasukkan kelambu untuk tidur didalam air tempat nambang timah<sup>11</sup>. Tujuan

---

Sulaiman, *Menyoal Agama dan Keberagaman Kita* (Catatan Kecil Kilas Balik Kepulauan Babel), dalam *Setelah 14 Tahun Babel*, Imperium, Yogyakarta. hlm.8

<sup>10</sup> Rendy Hamzah, 2011. *Melongok Kearifan Lokal Negeri Habang*. Dalam *Sekancup Ancup of Bangka Belitung*. Yogyakarta. Khomsa. Hlm. 58-63

<sup>11</sup> Derita Prapti Rahayu, 2015, dalam *Kelekak Sejarah Bangka*, Disbudpar Bangka, Hlm. 263-265

utamanya agar orang tidak lagi menambang karena timah yang didapat berkualitas rendah.

Adanya kesadaran hukum lingkungan menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia<sup>12</sup>.

#### **D. Penutup**

Kerusakan lingkungan di Bangka Belitung yang terus terjadi dan dominan disebabkan oleh aktivitas tambang menuntut adanya penegakan hukum lingkungan yang tegas, baik terhadap pelaku perorangan maupun kepada korporasi. Dibutuhkan komitmen semua pihak, baik itu pemerintah daerah maupun penegak hukum. Politik hukum lingkungan di Bangka Belitung harus pada posisi prioritas dibandingkan dengan kepentingan ekonomi dan akibatnya lingkungan menjadi korban. Kemudian penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah mulai ditinggalkan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama serta para pendidik untuk dapat mensosialisasikan kearifan lokal ini agar masyarakat memahami, termasuk internalisasi nilai-nilai positifnya kepada para generasi muda. Hal ini penting untuk menumbuhkan dan menanamkan kesadaran kolektif bersama betapa berharganya lingkungan hidup yang sehat demi kelangsungan hidup manusia.

---

<sup>12</sup>Dwi Haryadi, 2009, *Memahami Hukum Lebih Kritis*, Pangkalpinang, UBB Press, hlm. 28



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2010. *Victimology*, Jakarta: PTIK.
- Derita Prapti Rahayu, 2015, dalam *Kelelak Sejarah Bangka*, Disbudpar Bangka
- Dwi Haryadi, 2009, *Memahami Hukum Lebih Kritis*, Pangkalpinang, UBB Press
- Jimmy Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution*, Jakarta, Rajawali Press
- Laporan Review Lahan Kritis Prov. Kep. Babel Tahun 2013*, BPDAS Baturusa Cerucuk, Kementerian Kehutanan
- Pos Belitung edisi 11 Februari 2014
- Rendy Hamzah, 2010. *Bangka Selatan dalam Narasi Awal Kebangkitan*. Bangka. INTIKLAD
- Rendy Hamzah, 2011. *Melongok Kearifan Lokal Negeri Habang*. Dalam Sekancup Ancup of Bangka Belitung. Yogyakarta. Khomsa. Hlm. 58-63
- Rusydi Sulaiman, *Menyoal Agama dan Keberagaman Kita* (Catatan Kecil Kilas Balik Kepulauan Babel), dalam *Setelah 14 Tahun Babel*, Imperium, Yogyakarta
- Yeni Widowaty, 2011. *Viktimologi (Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*. Semarang, BP Undip
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

### **Biografi Singkat**

Nama	: Dr. Dwi Haryadi, SH. MH.
TTL	: Nyemoh, 17 Juli 1983
Tugas	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Pendidikan	: S1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang (2001-2005) S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2005-2007) S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2011-2015)
Keahlian	: Hukum Pidana, Pidana Khusus, Politik Hukum Pidana dan Hukum Pertambangan
HP/Email	: 08117174501 / dwi_lawangsewu@yahoo.co.id